

PENGUATAN TATA KELOLA DAN PELAYANAN DESA WISATA DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

Komarun Zaman, Siswohadi, Ayi Hendriawan, Ikayanti, Danang Aprilianto,
Kirana Salsabila Citra Wijaya, Dewi Anjani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, Surabaya, Indonesia
E-mail Korespondensi : siswohadi@stiepemuda.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penguatan tata kelola dan pelayanan desa wisata dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang mengkaji berbagai referensi ilmiah, kebijakan, dan hasil penelitian terkait pengelolaan desa wisata. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pemanfaatan teknologi digital berkontribusi terhadap kepuasan wisatawan dan daya saing destinasi. Penguatan kedua aspek tersebut berdampak pada meningkatnya kunjungan wisata, berkembangnya usaha lokal, terciptanya lapangan kerja, dan bertambahnya pendapatan masyarakat. Dengan demikian, penguatan tata kelola dan pelayanan desa wisata menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: desa wisata; tata kelola; pelayanan; kemandirian ekonomi; pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

Tourism village development has become a strategic approach to improving community welfare through the sustainable utilization of local resources. This study aims to examine the role of strengthening governance and service quality in tourism villages to promote the economic independence of rural communities. The study employs a qualitative approach using a literature review method by analyzing relevant academic publications, government policies, and previous research on tourism village management. The findings indicate that effective governance, characterized by transparency, accountability, community participation, and stakeholder collaboration, enhances the sustainability and performance of tourism village management. Furthermore, improving service quality through human resource development, adequate infrastructure, and digital technology adoption increases visitor satisfaction and destination competitiveness. These improvements contribute to higher tourist arrivals, expanded local business opportunities, increased household income, and sustainable employment. Therefore, strengthening governance and service quality is a key strategy for fostering economically independent rural communities while supporting sustainable rural development and enhancing the long-term resilience of tourism villages.

Keywords: tourism village; governance; service quality; economic independence; community empowerment.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa wisata telah menjadi salah satu strategi pembangunan berbasis masyarakat yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Konsep desa wisata tidak hanya menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata semata, tetapi juga pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki desa. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan alam, budaya, tradisi, kuliner, kerajinan, maupun kearifan lokal yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dengan pengelolaan yang baik, desa wisata mampu menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas dan keberlanjutan budaya lokal (Nuryanti & Hidayah, 2021; Junaid et al., 2022).

Di Indonesia, pengembangan desa wisata sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan. Berbagai program pemerintah telah mendorong percepatan pertumbuhan desa wisata melalui peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberian dukungan kebijakan dan pendanaan. Namun demikian, keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan potensi dan dukungan program, melainkan juga oleh kualitas tata kelola dan pelayanan yang diterapkan dalam pengelolaannya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023; Fasa et al., 2022).

Tata kelola desa wisata merupakan aspek penting yang menentukan efektivitas pengelolaan sumber daya, koordinasi antar pemangku kepentingan, transparansi pengelolaan keuangan, serta keberlanjutan program pengembangan wisata. Tata kelola yang baik ditandai oleh adanya perencanaan yang jelas, pembagian peran yang terstruktur, partisipasi masyarakat yang aktif, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berjalan secara konsisten. Sebaliknya, lemahnya tata kelola sering kali menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kurangnya koordinasi antar pengelola, konflik kepentingan, rendahnya akuntabilitas, dan ketidakmampuan dalam mengembangkan potensi wisata secara optimal (Sutrisno et al., 2021; Megawati et al., 2022).

Selain tata kelola, kualitas pelayanan juga menjadi faktor yang sangat menentukan daya saing desa wisata. Wisatawan saat ini tidak hanya mencari destinasi yang menarik secara visual, tetapi juga mengharapkan pengalaman yang nyaman, aman, dan berkesan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pengelola maupun masyarakat lokal harus mampu memenuhi harapan wisatawan. Pelayanan yang baik mencakup keramahan, penyediaan informasi yang memadai, kebersihan lingkungan, keamanan, serta kesiapan fasilitas pendukung wisata. Kualitas pelayanan yang rendah dapat menurunkan tingkat kepuasan wisatawan dan berdampak pada berkurangnya minat kunjungan maupun promosi dari mulut ke mulut (Prasetyo & Wulandari, 2023; Junaid et al., 2022).

Di sisi lain, tujuan utama pengembangan desa wisata adalah menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kemandirian ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan potensi lokal tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan dari pihak luar. Kehadiran desa wisata diharapkan mampu mendorong tumbuhnya berbagai usaha ekonomi masyarakat, seperti homestay, usaha kuliner, jasa pemandu wisata, kerajinan tangan, penyewaan transportasi lokal, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata (Aulia et al., 2024; Kemenparekraf, 2023).

Meskipun demikian, pada praktiknya masih banyak desa wisata yang belum mampu memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Beberapa kendala yang sering ditemukan antara lain keterbatasan kapasitas pengelola, kurangnya inovasi pelayanan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya sistem tata kelola yang diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan pelayanan desa wisata menjadi kebutuhan yang mendesak agar potensi yang dimiliki dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan (Megawati et al., 2022; Rahmawati & Nugroho, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya penguatan tata kelola dan pelayanan desa wisata sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi sekaligus memperluas manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan wisatawan, diyakini dapat meningkatkan daya saing desa wisata. Pada akhirnya, penguatan kedua aspek tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Fasa et al., 2022; Aulia et al., 2024).

Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu bentuk pengembangan pariwisata yang menjadikan desa sebagai destinasi dengan mengoptimalkan potensi alam, budaya, tradisi, serta kehidupan masyarakat lokal sebagai daya tarik utama wisata. Konsep desa wisata tidak hanya berfokus pada kunjungan wisatawan, tetapi juga menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, masyarakat berperan sebagai pelaku utama yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, hingga pengembangan kegiatan wisata sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa (Fasa et al., 2022).

Pengembangan desa wisata juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pengembangan desa wisata diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro dan ekonomi kreatif, serta menjaga kelestarian

budaya dan lingkungan lokal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat ribuan desa di Indonesia telah berpartisipasi dalam program pengembangan desa wisata melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), yang menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap sektor ini (Kemenparekraf, 2023).

Selain itu, keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh pemberdayaan masyarakat, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Desa wisata yang dikelola secara partisipatif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, memperluas peluang usaha, dan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi desa (Megawati et al., 2022; Junaid et al., 2022).

Tata Kelola

Tata kelola merupakan suatu sistem, proses, dan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, serta mengawasi pelaksanaan suatu organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pembangunan desa, tata kelola menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program, termasuk dalam pengelolaan desa wisata. Tata kelola yang baik (*good governance*) ditandai oleh adanya partisipasi masyarakat, transparansi pengambilan keputusan, akuntabilitas pengelola, penegakan aturan, serta efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Setiawan & Pramudito, 2021).

Pada pengelolaan desa wisata, tata kelola berfungsi sebagai landasan dalam mengatur hubungan antara pemerintah desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku usaha, masyarakat, dan pihak eksternal lainnya. Penerapan tata kelola yang baik memungkinkan adanya koordinasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program wisata sehingga manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat desa (Fasa et al., 2022). Selain itu, tata kelola yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola serta mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan desa wisata (Rahmawati & Nugroho, 2024).

Sebaliknya, lemahnya tata kelola dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakefisienan pengelolaan, konflik kepentingan, rendahnya transparansi keuangan, dan kurang optimalnya pemanfaatan potensi wisata desa. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi salah satu faktor strategis dalam menciptakan desa wisata yang berdaya saing dan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Megawati et al., 2022; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023).

Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi merupakan kondisi ketika individu, kelompok, atau masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan pihak luar. Dalam konteks pembangunan desa, kemandirian ekonomi menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan karena mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan, mengelola, dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Kemandirian ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang usaha, mengelola aset produktif, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal (Suryana & Nugraha, 2021).

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi yang dapat mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui pemanfaatan potensi wisata lokal, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan berbagai usaha produktif, seperti homestay, kuliner, kerajinan tangan, jasa pemandu wisata, transportasi lokal, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya. Aktivitas ekonomi tersebut dapat menciptakan sumber pendapatan baru serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor ekonomi tradisional yang cenderung terbatas (Junaid et al., 2022; Fasa et al., 2022).

Selain itu, kemandirian ekonomi juga berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa, semakin besar peluang terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap pasar, inovasi usaha, serta tata kelola yang baik agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat desa (Aulia et al., 2024; Rahmawati & Nugroho, 2024). Dengan demikian, kemandirian ekonomi menjadi tujuan utama yang ingin dicapai melalui pembangunan desa berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat.

1.2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat pengelolaan desa wisata agar mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Penguatan tata kelola dan pelayanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas destinasi wisata serta partisipasi masyarakat dalam pengembangannya.

Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta kemandirian ekonomi masyarakat desa yang berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi wisata lokal.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan kapasitas tata kelola desa wisata melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata desa.
- Meningkatkan kualitas pelayanan desa wisata agar mampu memberikan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan memuaskan sehingga meningkatkan daya tarik serta daya saing destinasi.
- Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha berbasis wisata dan optimalisasi pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.

1.3. Manfaat Kegiatan

Kegiatan penguatan tata kelola dan pelayanan desa wisata diharapkan memberikan manfaat yang nyata bagi pengelola, masyarakat, dan pemerintah desa dalam mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Manfaat tersebut sejalan dengan tujuan kegiatan yang berfokus pada peningkatan tata kelola, kualitas pelayanan, dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Adapun manfaat kegiatan ini adalah:

- Meningkatnya kapasitas tata kelola desa wisata sehingga pengelolaan potensi wisata dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan terarah.
- Meningkatnya kualitas pelayanan desa wisata yang ditunjukkan melalui pelayanan yang lebih profesional, ramah, dan berorientasi pada kepuasan wisatawan sehingga mampu meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata.
- Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui berkembangnya usaha-usaha berbasis pariwisata, peningkatan pendapatan masyarakat, serta terbukanya peluang kerja dan usaha yang berkelanjutan.

1.4. Luaran Pengabdian Masyarakat

Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun secara terarah dan selaras dengan tujuan serta manfaat kegiatan, yaitu untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa wisata. Luaran yang dihasilkan diharapkan dapat diimplementasikan secara langsung oleh masyarakat dan pengelola desa wisata sebagai pedoman keberlanjutan pengembangan.

Adapun luaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas pengelola desa wisata dalam tata kelola yang baik, yang ditunjukkan melalui pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.
- Tersusunnya pedoman atau standar pelayanan desa wisata, yang mencakup aspek keramahan, kenyamanan, keamanan, serta kualitas layanan kepada wisatawan untuk meningkatkan daya tarik dan kepuasan pengunjung.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, yang tercermin dari keterlibatan aktif dalam kegiatan wisata serta pengembangan potensi lokal di desa.
- Terbentuknya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis wisata, seperti UMKM, homestay, kuliner, dan jasa wisata yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.
- Dokumen laporan akhir pengabdian masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan sekaligus bahan evaluasi dan rujukan dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis penguatan tata kelola dan pelayanan desa wisata dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan konseptual dengan metode studi kepustakaan (library research), yang berfokus pada pengkajian berbagai teori, konsep, kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tata kelola desa wisata, kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi desa. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga terkait, serta publikasi resmi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai sumber literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan

reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan desa wisata, dan kemandirian ekonomi masyarakat desa, sehingga diperoleh rekomendasi konseptual yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Realisasi Kegiatan

Susunan Tim Pelaksana Mahasiswa & Dosen :

Ketua	=	Komarun Zaman, S.E., M.M
Dosen 1	=	Siswohadi, S.E., M.M.
Dosen 2	=	Ikayanti, S.E., M.S.A
Dosen 3	=	Ayi Hendriawan S.E., M.S.A
Dosen 4	=	Danang Apriliyanto, S.E., M.M.
Anggota 1	=	Kirana Salsabila Citra Wijaya
Anggota 2	=	Dewi Anjani

3.2. Bentuk Kegiatan, Waktu & Lokasi Kegiatan

- **Bentuk Kegiatan :**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pengelola serta masyarakat desa wisata. Materi kegiatan mencakup penguatan tata kelola desa wisata yang baik (good governance), peningkatan kualitas pelayanan wisata, serta pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal. Selain itu, kegiatan juga dilakukan melalui diskusi partisipatif, praktik langsung, dan evaluasi bersama untuk memastikan penerapan materi di lapangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

- **Waktu Kegiatan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan program, yaitu dalam rentang waktu tahun 2026. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap, meliputi tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan inti, serta tahap evaluasi dan penyusunan laporan akhir.



- **Lokasi Kegiatan**

Lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berada di Desa Wisata Asriloka Wonosalam, Dusun Notorejo, Desa Sumber, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi wisata alam dan budaya yang berkembang serta membutuhkan penguatan dalam aspek tata kelola, pelayanan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Desa Wisata Asriloka Wonosalam memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai desa ekowisata berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Namun demikian, pengembangan desa wisata masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek tata kelola kelembagaan, optimalisasi daya dukung lingkungan dan fasilitas wisata, serta pemasaran destinasi yang belum dilakukan secara maksimal.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, diharapkan kapasitas pengelola desa wisata, perangkat desa, PKK, Karang Taruna, dan masyarakat dapat meningkat. Penguatan pengetahuan dan keterampilan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan desa ekowisata yang lebih profesional, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

4.2. Saran

1. Pengelola Desa Wisata Asriloka Wonosalam perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola desa wisata yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Masyarakat perlu terus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan pengembangan produk wisata berbasis potensi desa.
3. Pengelola desa wisata perlu memanfaatkan teknologi informasi dan media digital secara optimal sebagai sarana promosi dan pemasaran destinasi wisata kepada pasar

DAFTAR PUSTAKA

- Aryadi, R. D. (2023). Analisis pengembangan desa wisata sebagai best practice penggunaan dana desa untuk mewujudkan good governance dan collaborative governance. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.13213>
- Daniati, H., Maulina, L., Kuswandi, D., Nugraha, S. Y. I., & Rosiana, E. N. (2022). Potensi pengembangan wisata edukasi berbasis community based tourism di Desa Wisata Ngargoretno. *Tourism Scientific Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.32659/tsj.v7i2.117>
- Filantropi, B., & Bella, P. A. (2022). Studi keberhasilan pengelolaan desa wisata berbasis community based tourism (Studi kasus: Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta). *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 4(1). <https://doi.org/10.24912/stupa.v4i1.17295>
- Maharani, A. E. P., Haningati, G. C. S., & Dewangga, M. A. (2024). Government policy strategy in developing tourism villages through village-owned enterprises. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(2). <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.31803>
- Monika, T., & Prakoso, A. A. (2023). Evaluasi pengembangan desa wisata: Studi kasus pada Desa Wisata Pacarejo Gunungkidul. *Journal of Tourism and Economic*, 6(1), 11–26. <https://doi.org/10.36594/jtec/e6v6n1a2>
- Nurfadlilah, H. I., & Karniawati, N. (2023). Strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan desa wisata. *GovSci: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2). <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i2.46>

- Prabawati, N. P. A., & Supriliyani, N. W. (2023). Pengembangan desa wisata berbasis collaborative governance di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 11(2). <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2023.v11i02.p21>
- Pradana, G. W., Zarkasyi, & Haryono, H. (2021). Tourism village management requires good tourism governance: Study in the Kampung Lampion Code 18 Yogyakarta area. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(1), 20–27. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p20-27>
- Prasetyo, H. (2023). Management of tourism villages with collaborative governance in Kebumen District. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 13(1), 49–58. <https://doi.org/10.31289/jap.v13i1.8730>
- Puspitasari, Y., & Eprilianto, D. F. (2023). Partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan desa wisata (Studi kasus pada Desa Wisata Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek). *Publika*, 11(3), 2051–2066. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2051-2066>
- Revida, E., Ismail, R., Lumbanraja, P., Trimurni, F., Sembiring, S. A. B., & Purba, S. (2023). Village owned enterprises governance (BUMDes) based on the tourism village development. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(10), 3341–3346. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181034>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI): Pedoman pengembangan desa wisata berkelanjutan*. Jakarta: Kemenparekraf. Retrieved from <https://kemenparekraf.go.id>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi lokal*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- UN Tourism (UNWTO) Official Website
- United Nations World Tourism Organization. (2021). *Tourism for rural development: A policy framework and recommendations*. Madrid, Spain: UNWTO. Retrieved from <https://www.unwto.org/tourism-for-rural-development>